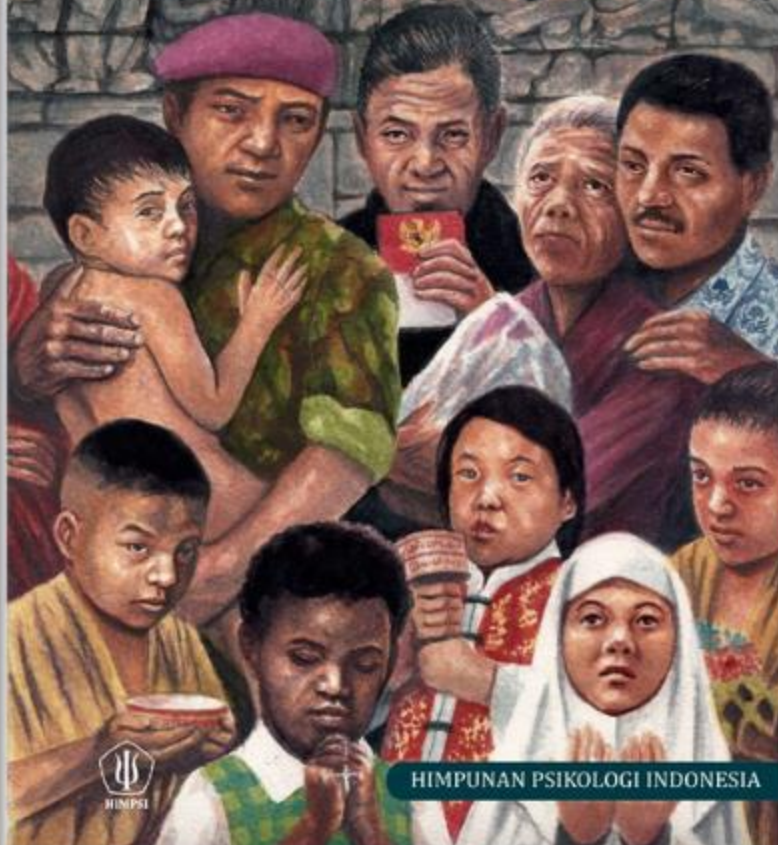


Seri Sumbangan Pemikiran Psikologi Untuk Bangsa

1

# Revolusi Mental: Makna dan Realisasi



HIMPUNAN PSIKOLOGI INDONESIA

>|

>

BAGIAN III Sosial Kemasyarakatan		BAGIAN IV Organisasi / Komunitas	
20. Kerangka Dinamis Pencegahan dan Resolusi Konflik <i>Ichsan Malik</i> .....	241	30. Membangun Budaya Organisasi yang Hidup: Salah Satu Upaya Pengembangan Manusia Berkarakter dan Berbudhi Pekerti Lahur <i>Wianabrata Hendrojuwono</i> .....	377
21. Revolusi Mental dan Pencegahan Konflik Antar Kelompok: Mengurangi Internalisasi Identitas Kelompok yang Berlebih Sebagai Upaya Pencegahan Konflik Antar Kelompok <i>Ichlas Nanang Afandi</i> .....	251	31. Revolusi Mental Wirasaha dalam Globalisasi Dunia <i>Benedicta Prihatin Dwi Riyanti</i> .....	393
22. Menentang Diskriminasi, Merentang Persaudaraan <i>Clara Moningka &amp; Steven Wijaya</i> .....	259	32. Mengantisipasi Degradasi Mamusia Indonesia: Quo vadis Tes Proyeksi! <i>Sarifito Winawan Sarwono</i> .....	405
23. Sistem Peringatan Dini Konflik Sosial Bermansa Agama <i>Subhan El Hafiz, Yulmaida Amir &amp; Anisita Kumala</i> .....	271	33. Menuju Undang-Undang Praktik Psikologi: Revolusi Mental Psikolog Praktik <i>Riza Saraswita</i> .....	419
24. Merawat dan Memperkuat Ke-Bhinneka-an dengan Mengembangkan Kemampuan Komunikasi <i>Rayini Dahesihari, Clara R.P. Ajiukomo, Juliana Murniati dan Hoshuel W. Erlan</i> .....	283		
25. Modal Sosial Masyarakat Korban dalam Konteks Kebijakan Pembebasan Tanah Proyek Kanal Banjir Timur (KBT) di DKI Jakarta <i>Pieter George Manoppo</i> .....	297		
26. Revolusi Mental Berbasis Masyarakat Sebagai Fungsi Kontrol Sosial Bagi Upaya Preventif Terjadinya Kasus <i>Human Trafficking</i> di Jawa Timur <i>Ike Hirdiana</i> .....	325		
27. Menyalakan Kembali Semangat Kerja sama <i>Juliana Murniati</i> .....	339		
28. Revolusi Mental, Kesetaraan Gender dan Peran Psikologi <i>Saparinah Sailli, Livia Iskandar dan Hana Panggabean</i> .....	355		
29. Pergeseran Nilai Budaya Jawa <i>Retno Suhapri</i> .....	365		
xxiii		xxiv	

## 22

### Menentang Diskriminasi, Merentang Persaudaraan

*Clara Moningka & Steven Wijaya*

*"Orang tua saya tidak memperbolehkan saya berpacaran dengan orang yang berbeda suku dari saya"*  
*"Orang tua saya tidak pernah berbicara mengenai perbedaan",*  
*"Keluarga saya mengajarkan saya bahwa suku dan agama saya yang paling baik"*

Kutipan di atas adalah apa yang diutarakan mahasiswa saya di dalam kelas Psikologi Lintas Budaya. Ketika saya ajak berdiskusi mengenai perbedaan, mereka semula cenderung diam, berbisik-bisik dengan teman di sebelahnya, sampai ada satu mahasiswa yang berani angkat suara menceritakan mengenai perbedaan agama dan suku antara ayah dan ibunya. Ia menceritakan bahwa hal ini kerap menjadi konflik dan pergulatan dalam dirinya sendiri. Baru kemudian yang lain angkat bicara dan mulai memperbincangkan mengenai perbedaan.

Perbedaan dalam masyarakat bukanlah sesuatu hal yang baru dibicarakan. Di kota besar seperti Jakarta yang sudah merupakan wadah percampuran berbagai individu dari berbagai bangsa atau etnis (*melting pot*), konflik dan berbagai perdebatan mengenai perbedaan, diskriminasi, dan prasangka tetap masih hangat. Yang paling mengkhawatirkan, hal ini juga dialami oleh para golongan terpelajar. Bayangkan di saat modernitas merambah ke berbagai sektor, isu mengenai perbedaan tetap hangat bahkan kerap kali menimbulkan konflik.

Di negara kita, Indonesia dengan semboyan *"Bhinneka Tunggal Ika"* atau berbeda-beda tetapi satu jua, konflik antar suku dan etnis akrab di masyarakat kita. Sebut saja konflik Dayak dan Madura, konflik di Ambon antar penganut agama yang berbeda, bahkan konflik antar suku di Papua. Asas yang menjadi dasar kehidupan bermasyarakat kita di mana perbedaan seharusnya mempersatukan, seperti halnya sekedar istilah saja.

Sangat disayangkan bahwa semboyan yang begitu indah; tidak hanya dari arti namun juga pengajawantahannya hanya sia-sia belaka. Kita tinjau saja konflik antar etnis yang seringkali muncul, yaitu konflik antara etnis keturunan Tionghoa dengan etnis pribumi.

Etnis Tionghoa sudah ada di Indonesia sejak abad ke-9 pada masa Dinasti Tang (618-907). Saat itu banyak orang Tionghoa datang ke Indonesia untuk tujuan berdagang. Namun dengan waktu tempuh yang lama, banyak dari orang Tionghoa tersebut menetap di Indonesia. Masuknya budaya Tionghoa ke Indonesia turut memberikan warna pada budaya asli Indonesia, misalnya pada relief bangunan, motif batik, dan kesenian lainnya. Hal ini merupakan proses akulturasi, perpaduan dua kebudayaan yang sebenarnya sangat unik. Etnis Tionghoa sendiri memiliki budaya yang unik dengan beragam ritual. Masyarakat Tionghoa juga kerap memiliki keberakaran yang kuat terhadap budayanya. Mereka cenderung mempertahankan budaya leluhur yang ada.

Berdasarkan hasil sensus penduduk yang dilakukan Biro Pusat Statistik tahun 2010, jumlah etnis Tionghoa di Indonesia sebanyak 1.2% dari jumlah seluruh penduduk yang ada. Meskipun menjadi kelompok minoritas, namun peranan etnis Tionghoa di Indonesia tidaklah kecil. Dalam bidang perekonomian, 90% perekonomian di Indonesia dikendalikan oleh etnis Tionghoa (Adidharta, 2013). Etnis Tionghoa bahkan terlibat dalam perang memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Pada masa setelah kemerdekaan, banyak dari warga keturunan Tionghoa yang memberikan kontribusi dalam bidang olahraga (sebut saja Susy Susanti dan Alan Budikusuma), pendidikan, dan lain sebagainya. Meskipun sudah memberikan peranan yang cukup banyak bagi negeri ini, namun etnis Tionghoa tetap mendapatkan perlakuan diskriminasi dari kelompok pribumi.

Jika ditelusuri pada awalnya etnis Tionghoa yang menetap di Indonesia hidup berdampingan dengan warga setempat. Tidak pernah terjadi bentrokan diantara mereka sampai adanya VOC (*Verenigde Oost Indische Compagnie*), kamar dagang Belanda di Indonesia. VOC dengan politik memecah belah (*divide et impera*) berusaha memisahkan warga etnis Tionghoa dengan masyarakat setempat. Secara wilayah atau tempat tinggal, etnis Tionghoa dipisahkan dari warga setempat. Mereka dianggap sebagai warga timur asing (*vreemde-oesterlingen*) yang statusnya lebih tinggi dari masyarakat setempat (*inlander*) (Wijayakusuma, 2005). Politik memecah belah ini dilakukan karena VOC merasa terancam dengan etnis Tionghoa yang memiliki andil besar dalam perdagangan dan dapat hidup berdampingan. Politik memecah belah tersebut menyebabkan penduduk setempat memiliki prasangka terhadap warga etnis Tionghoa. Pada kenyataannya, warga etnis Tionghoa sendiri mendapatkan perlakuan yang tidak baik, seperti peraturan harus adanya ijin tinggal, perampasan harta, bahkan dipenjara dengan alasan yang tidak jelas, sampai